

**DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAYAH**

Arfiansyah

Leiden University, Netherlands
E-mail: arfiansyah.arfnor@gmail.com

Muhammad Riza

School of Humanities and Social Sciences University New South Wales, Australia
E-mail: mriza.nurdin@acehresearch.org

Abstrak

Dayah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Daerah Istimewa Aceh. Lembaga pendidikan ini sama halnya dengan pesantren yang ada di pulau Jawa baik dari aspek fungsi maupun tujuannya kendatipun di sana terdapat juga beberapa perbedaan yang penting. Pada tahun 2003, Pemerintah Aceh melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 451.2/474/2003 Tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Salah satu isinya adalah membuat kebijakan bahwa dayah di Aceh dibagi dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang dilakukan Pemerintah Aceh adalah dalam bentuk Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan Dayah Non Tipe. Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan jenis bantuan yang akan diberikan kepada dayah. Penelitian kualitatif ini melihat efektifitas bantuan pemerintah tersebut untuk menunjang kualitas pendidikan di dayah. Pengumpulan data didapat melalui interview ke 4 buah dayah (2 buah dayah tradisional dan 2 buah modern) untuk melihat manajemen pendidikan dan dampak bantuan pemerintah. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen pendidikan dayah masih bergantung pada figur pimpinan dayah (teungku), sehingga dampak bantuan pemerintah juga bervariasi positif terhadap pembangunan fisik dan peningkatan sarana dan prasarana, namun merubah paradigma positif menjadi negatif terhadap teungku.

Kata Kunci: *Dayah; Pendidikan Islam; Teungku*

Abstract

Dayah is an Islamic educational institutions located in Aceh. This educational institution is similar to the so-called *pesantren* – an Islamic boarding school in the island of Java, both from the aspect of function and purpose (although there are also some important differences). In 2003, the Government of Aceh through the Governor of Nanggroe Aceh Darussalam Decree, issued a regulation, numbered 451.2 / 474/2003 on the Criteria Stipulation and *Dayah* Assistance in the province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). One of the subject matter is to make a policy that *dayah* is divided into several classifications: Type A, Type B, Type C and Non Type. This classification aims to distinguish the type of assistance to be given to *dayah*. This qualitative study is conducted to see how effective is the government assistance to support the quality of education in *dayah*. By conducting interviews to four (4) different *dayah* (2 interviews at traditional *dayah* and 2 at modern *dayah*), this research is expected to analyze the management of education and the impact of government assistance. The results of this study concluded that the education

management of *dayah* remain dependent on their leadership figure (*teungku*), so that the impact of government assistance also varies positively to *dayah* physical development and improvement of facilities and infrastructure, but this assistance has also interestingly changed *teungku*'s positive paradigm into a much more negative one.

Keywords: *Dayah; Islamic Education; Teungku*

مستخلص

داية هي المؤسسات التعليمية الإسلامية تقع في أتشيه. هذه المؤسسات التعليمية والمدارس تقع أيضا في جزيرة جاوا على مستوى سواء باسم المعهد، سواء من جانب وظيفة والغرض وإن كانت هناك أيضا بعض الاختلافات الهامة. في عام 2003، أصدرت حكومة منطقة أتشيه من خلال قرار محافظ نانغرو أتشيه دار السلام الرقم : 2003/474/451.2 م بتعيين تحديد معايير ومساعدة للدايات (المعاهد) في نانغرو أتشيه دار السلام. ومن إحدى القرارات منها تنقسم الدايات (المعاهد) في أتشيه إلى عدة تصنيفات. تصنيف حكومة أتشيه في شكل الداية إلى نوع A، نوع B، والنوع C والداية بدون نوع. ويهدف هذا التصنيف لتمييز نوع من أنواع المساعدة التي تقدم إلى الدايات. هذه الدراسة النوعية لنرى كيف فعالية المساعدات الحكومية لدعم جودة التعليم في الدايات. من خلال إجراء مقابلات مع أربع الدايات (الداياتان بمنهج التقليدية و والداياتان بمنهج الحديثة) لرؤية إدارة التعليم وتأثير المساعدات الحكومية. و نتائج هذا البحث أن إدارة التعليم الداية تعتمد على شخصية بارزة (*Teungku*)، وبالتالي، فإن تأثير المساعدات الحكومية أيضا بشكل إيجابي في التنمية العمرانية وتحسين المرافق والبنية التحتية، ولكن تغيير رؤية الإيجابية إلى السلبية لشخصية بارزة (*Teungku*).

الكلمات الرئيسية: الداية، التربية الإسلامية، لشخصية بارزة (*Teungku*)

A. Pendahuluan

Sebelum Islam masuk, kebudayaan masyarakat Aceh dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha terutama di pesisir pantai. Sedangkan di daerah pedalaman masih dipengaruhi oleh budaya animisme dan dinamisme. Islam masuk ke kepulauan Nusantara lewat semenanjung Malaka pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan, dakwah dan tasawuf yang dibawa oleh pedagang, para dai dan sufi muslim pada waktu itu. Dari Semenanjung Malaka inilah Islam menyebar ke Sumatera, Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.¹

Dalam proses pengembangan pendidikan dan penyebaran Islam, maka dikenal suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan dayah pada abad ke-10 M. Kata *dayah* berasal dari kata *Zawiyah*. Istilah *dayah* pernah diucapkan oleh masyarakat Aceh Besar dengan sebutan *deyah* yang diperoleh dari Bahasa Arab. *Zawiyah* berarti sudut yang diyakini oleh masyarakat Aceh pertama sekali digunakan

¹ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675* (Medan: Monora, t.t), 22.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

untuk sudut masjid Madinah di mana Nabi Muhammad pernah mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para sahabat.² Secara terminologi, dayah dapat didefinisikan sebagai lembaga pendidikan formal yang santrinya bertempat tinggal di pondok yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya.³

Dayah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Daerah Istimewa Aceh. Lembaga pendidikan ini sama halnya dengan pesantren yang ada di pulau Jawa baik dari aspek fungsi maupun tujuannya kendatipun di sana terdapat juga beberapa perbedaan yang penting. Di antara perbedaan itu, seperti dilihat di Jawa Timur ialah bahwa pesantren itu merupakan satu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama, sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut.⁴

Dalam istilahnya, pesantren merupakan sekolah pendidikan umum yang persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum. Bahkan ada pula pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja. Model seperti ini disebut dengan pesantren *Salaf*. Pesantren atau pondok pesantren biasanya juga sering disebut pondok, adalah sekolah Islam berasrama (*Islamic boarding school*) dimana para santri belajar pada sekolah ini sekaligus tinggal pada asrama yang disediakan pesantren yang dipimpin oleh seorang kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik kelasnya, mereka biasanya disebut lurah pondok.

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti hotel atau asrama.

Ada beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia. Di Jawa termasuk Sunda dan

² M. Hasbi Amiruddin. "The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh", *Thesis* (Kanada: Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994), 41. Pengertian Dayah ini dapat juga dilihat dalam buku M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 31. Dayah yang berasal dari kata-kata *Zawiyah*, adalah nama sebuah lembaga pendidikan yang mula-mula dipakai di Afrika Utara, Lihat dalam buku A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), 192.

³ Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 03/INSTR/2008 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Definisi ini juga terdapat dalam Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

⁴ Abd. Rahman Saleh dkk, *Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, Departemen Agama RI :Proyek Pembinaan Bantuan kepada Pondok Pesantren 1984/1985 Ditjen Bimbaga Islam, 11

Madura umumnya digunakan istilah pesantren atau pondok, di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau *rangkang* atau *meunasah*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*. Di Aceh, dayah adalah tempat belajar agama bagi orang-orang yang telah dewasa saja. Pendidikan agama untuk anak-anak diberikan di *meunasah* atau di rumah-rumah guru.⁵

Ditinjau dari segi tempat memberikan pendidikan, maka pendidikan agama tingkat rendah yang diberikan kepada anak-anak ini dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama pendidikan agama untuk anak laki-laki mengambil tempat di *meunasah* dan kedua pendidikan agama untuk anak perempuan yang diberikan di rumah-rumah guru atau tempat lain yang khusus serta terpisah dengan anak laki-laki. Meskipun tempat belajar ini berbeda, namun materi dan tujuannya adalah sama.⁶

Pada umumnya anak-anak yang belajar di tingkat rendah adalah mereka yang belum mencapai usia baligh. Mereka diantarkan oleh orang tua mereka kepada *teungku* wanita untuk mendapat pendidikan dasar agama. Lama belajar tidak ada batas waktu tertentu. Pada umumnya pendidikan tingkat rendah dianggap selesai apabila seorang anak telah tamat mengaji al-Qur'an dan telah mengetahui cara-cara praktek ibadah wajib seperti sembahyang, puasa, dan hal-hal yang bertalian dengan itu.⁷

Berbeda dengan pendidikan agama tingkat rendah yang diberikan pada *meunasah* yang terdapat di tiap-tiap kampung, maka pendidikan dayah tidak demikian keadaannya. Ia hanya terdapat di beberapa tempat saja yang menyebabkan sebahagian besar para santrinya meninggalkan kampung halaman untuk memondok di tempat yang telah disediakan di dayah, yang terkenal dengan istilah merantau atau *meudagang*.⁸

Pada awalnya dayah merupakan usaha pribadi seseorang ulama, bukan usaha suatu yayasan. Dayah didirikan atas dasar dorongan tanggung jawab pribadi masing-masing ulama untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu dayah hanya terdapat di tempat-tempat yang ada ulama-ulama yang mempunyai ide

⁵ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 192.

⁶ Safwan Idris, "Tokoh-tokoh Nasional: Overseas Educational and the Evolution of the Indonesia Educated Elita", *Disertasi* (University of Wisconsin: Madison, 1982), 67-72.

⁷ Rusdin Pohan dkk, "laporan Penelitian Fluktuasi Pendidikan Agama di Aceh" (Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, 1980), 14.

⁸ Safwan Idris, "Refleksi Pewarisan Nilai-nilai Budaya Aceh, Peta Pendidikan Dulu dan Sekarang", *Jurnal Ar-Raniry*, No. 73, (1998), 58.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

dan kesadaran semacam ini. Sehubungan dengan itu pula kadang-kadang di sesuatu kabupaten terdapat satu saja atau tidak ada sama sekali.

Tidak semua orang yang mampu menamatkan pelajarannya di *meunasah* dapat belajar di dayah. Hal ini disebabkan karena letaknya jauh dengan kampung seseorang dan membutuhkan biaya yang besar. Penghasilan orang Aceh pada masa penjajahan Belanda tergantung kepada pertanian semata-mata. Hanya bagi orang-orang yang dekat dengan dayah itu atau orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pendidikan ini. Karena situasi dan lokasi dayah yang semacam itu, dilihat dari segi santrinya di sana terdapat persamaan dan perbedaan dengan pesantren yang ada di Jawa.

Meskipun dayah-dayah yang didirikan sesudah Belanda menguasai daerah Aceh, harus tunduk di bawah Ordonansi Guru tahun 1905 yang tercantum dalam *staatsblad* 1905 no. 550 yo s. 1925 no. 219.⁹ Mata pelajaran yang dapat diajarkan dibatasi serta diwajibkan melapor tiga bulan sekali kepada Belanda, namun ia tetap tumbuh dan berkembang dengan pesat di beberapa Kabupaten, di antaranya Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur.¹⁰ Sedangkan mata pelajaran yang dibolehkan oleh H.N. Swart, Gubernur militer/sipil Belanda di Aceh terbatas pada tiga mata pelajaran saja, yaitu : Bahasa Arab, Tauhid, dan Fiqh. Hal ini berbeda jauh dengan mata pelajaran yang ada pada dayah tinggi Baiturrahman yang berdiri pada masa kerajaan Islam, di samping mata pelajaran khusus berupa pelajaran Agama juga ada mata pelajaran Umum seperti kedokteran, falsafah, kimia dan lain-lain.¹¹

Untuk membuktikan fakta sejarah mengenai mata pelajaran yang diajarkan di dayah Baiturrahman di atas dapat kita buktikan dasar sejarah yang mengatakan bahwa Aceh masa jayanya telah mempunyai hubungan dengan dunia luar, baik dengan Eropa dan negara-negara Islam.

Aceh pada waktu itu di samping sebagai pusat politik di Asia Tenggara, juga merupakan pusat studi dan dakwah Islamiyah. Pada masa Sultan Ali Ri'ayat Syah (1568-1575) telah berdatangan ulama-ulama dari Makkah dan juga pada masa Sultan

⁹ Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", Monographi Lembaga Ekonomi dalam Kemasyarakatan, LIPI bersama Departemen Agama RI, 1976, 46-47; Lihat pula Laporan Penelitian, "Pengaruh PUSA Terhadap Reformasi di Aceh", *Jurnal IAIN Ar-Raniry*, No. 70, (1978), 7.

¹⁰ T.A. Talsya, "Pendidikan di Aceh Sebelum Indonesia Merdeka", *Jurnal Santunan*, No. 82, (1982), 14.

¹¹ *Ibid*, 15.

Alaudin (1577-1586) dari negara yang sama telah datang pula ulama-ulama untuk mengajar ilmu metafisika dan syari'at.¹²

Tidaklah mustahil sekitar tahun-tahun tersebut telah datang pula para ulama-ulama yang lain seperti dari Bagdad. Di Bagdad sejak pemerintahan Harun ar-Rasyid, orang-orang Islam tidak saja membatasi diri mereka dengan mempelajari ilmu syari'ah saja, akan tetapi telah melengkapi Ilmu Falsafah, Tasawwuf, Kedokteran, ilmu Kimia dan sebagainya. Ulama yang datang dari Bagdad dan juga orang-orang yang telah belajar di sana, sangat mungkin memperkenalkan sistem pendidikan itu di Aceh ketika itu.

Pendidikan dayah di Aceh dapat dibagi dalam dua bahagian, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Santri-santri yang belajar pada tingkat menengah pada umumnya mereka mondok di dayah. Dalam masa belajar ini mereka mengurus semua keperluannya maupun memasak, menyuci pakaian. Pendidikan dayah Tingkat Menengah disebut dengan istilah *Rangkang* dan guru yang mengajar di sini disebut *teungku rangkang* biasanya terdiri dari santri yang belajar di dayah tingkat tinggi yang disebut *bale*.¹³

Kemajuan suatu dayah sangat bergantung kepada ulama yang memimpin, bukan kepada nama dayah. Oleh karena itu kita mengetahui mengapa seseorang santri itu pergi belajar ke dayah yang jauh sedangkan di dekatnya ada dayah. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan untuk memilih guru dan ilmu yang ingin dipelajari seseorang. Adapun mata pelajaran yang dipelajari di dayah tingkat rangkang ini antara lain: hukum-hukum agama (dalam bahasa Jawi), Ilmu Tauhid, Akhlak, Bahasa Arab.

Tidak semua santri yang belajar pada tingkat menengah sukses dalam studinya. Banyak yang gugur di tengah jalan, disebabkan oleh bermacam faktor, di antaranya karena tidak terikat dengan suatu sistem yang memaksa mereka harus

¹² Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsep Syeikh Nuruddin Ar-Raniry* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 31.

¹³ *Rangkang* adalah rumah panggung kecil yang memuat dua orang tiap rumah atau merupakan rumah panjang yang dibagi dalam beberapa bilik, yang tiap bilik ditempati oleh dua orang. Rangkang disediakan oleh dayah dengan bangunan yang sederhana. Pembangunan rangkang disebabkan, 1. Kemasyhuran seorang teungku dan kedalaman ilmunya tentang Islam, menarik murid-murid dari jauh, sehingga harus menetap di dekat kediaman teungku agar dapat menggali ilmunya secara teratur. 2. Di sekitar lingkungan dayah tidak menyediakan akomodasi yang cukup untuk murid, sehingga perlu adanya rangkang khusus. 3. Adanya sikap timbal balik antara teungku dengan murid. Murid menganggap teungku sebagai orang tua sendiri dan teungku menganggap murid sebagai "titipan" Tuhan yang harus dilindungi. Sudirman, "Lembaga Pendidikan Dayah pada Masyarakat Aceh" *Buletin Haba*, Nomor 12 (1999), 37.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

menyelesaikan studi dalam batas waktu tertentu. Di samping itu adalah faktor bahasa Arab yang amat sukar dipelajari, terutama bagi santri yang setengah hati untuk belajar.¹⁴

Adapun alumni-alumni dayah tingkat menengah yang tidak dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, dengan seizin dari gurunya pulang ke tempat masing-masing untuk menjadi juru dakwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakatnya, mengembangkan ide dan semangat dayah di seluruh daerah di mana mereka berada. Mereka ini menjadi pemuka masyarakat dan ulama tingkat menengah yang mengabdikan dalam mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam. Pada umumnya mereka ini mendapat penghormatan dan status sosial yang lebih tinggi dari warga yang lain dalam masyarakat.

Tamat dari tingkat pendidikan menengah (*rangkang*) dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat *Bale*, yaitu tingkat lebih tinggi dari pendidikan *rangkang*. Pada tingkat tinggi ini pendidikan mereka telah beralih kepada jurusan spesialisasi tertentu.

Di sini mereka memperdalam suatu bidang ilmu agama seperti Fiqh, Tafsir, Hadits dan lain-lain yang mereka sukai atau senangi. Mereka diperbolehkan, dengan izin ulama dayah pindah ke dayah lain di mana terdapat jurusan yang disukainya. Biasanya santri-santri pada tingkat *Bale* ini menjadi guru pada tingkat *Rangkang*, dengan status asisten *teungku di Bale*. Pada tingkat ini sistem belajarnya sama dengan cara biasa yang terdapat pada tingkat menengah seperti diadakan sidang diskusi yang merupakan ciri dan cara belajar di *Bale* dan membahas masalah yang telah ditentukan oleh guru besar dayah, kemudian dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang timbul dalam dayah itu sendiri dan dalam masyarakat yang menghendaki pemecahannya. Hal semacam ini sering terjadi pula pada ma'had-ma'had Tinggi di Timur Tengah, di mana Khalifah meminta kepada para ulama membahas sesuatu masalah tertentu.

Dalam sidang-sidang diskusi inilah akan kelihatan calon-calon ulama, yang bukan hanya mampu membaca kitab, akan tetapi mampu menggunakan isi kitab dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Di samping sidang diskusi seperti ini juga akan merupakan batu ujian bagi santri-santri *Bale* apakah mereka telah mampu

¹⁴ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia...*, 114.

berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkaitan dengan agama atau memimpin suatu dayah baru.

Perkembangan pendidikan dayah di Aceh pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang tiga setengah tahun, mendapat pengawasan ketat sehingga dayah sulit berkembang. Namun demikian dayah telah berusaha menunjukkan keberhasilan-keberhasilannya di dalam mengembangkan pendidikan Islam kepada anak-anak Aceh, minimal sampai di awal kemerdekaan. Ini terlihat dari banyaknya posisi-posisi penting pemerintah yang mengharap tangan-tangan alumni dayah, misalnya jabatan Gubernur Militer Wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo yang dijabat oleh Tgk. Muhammad Daud Beureuh yang merupakan alumni dayah.¹⁵ Di bidang agama dan intelektual terlihat Tgk. Muda Waly yang pernah menjadi penasehat Presiden Soekarno, dan Tgk. Ujung Rimba, yang pada masa pemerintahan Orde Baru pernah menjadi salah seorang anggota DPA.¹⁶

Hal yang sangat menarik untuk dicermati di antara para ulama tamatan dayah di atas adalah Tgk. Muda Waly. Dia adalah tokoh agama yang mempunyai pengaruh di kalangan ulama-ulama lainnya, karena pengetahuan keagamaan dan keteguhannya dalam memegang sesuatu pendapat. Pengaruh ini terbangun pada generasi berikutnya yang mengembangkan sistem pendidikan dayah. Seperti yang telah dikembangkan oleh anak-anaknya, di mana anak-anaknya di samping memperoleh status sosial sebagai ulama dan juga memperoleh kedudukan-kedudukan politis dalam lembaga legislatif.

Dalam sejarahnya, dayah Cot Kala merupakan dayah tertua yang terletak di sekitar Bayeun Aceh Timur. Dayah tersebut berdiri pada masa kerajaan Islam Peureulak dan dibangun oleh seorang ulama pangeran Teungku Chik Muhammad Amin pada akhir abad III H atau awal abad X M.

Pemimpin dayah bersama keluarganya berdiam di lokasi dayah, sehingga setiap saat dapat melakukan transformasi ilmu kepada para pencari ilmu (*thullâb*). Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, para ulama menulis karya mereka dalam berbagai disiplin ilmu keislaman di dayah. Hasil kajian dan diskusi di dayah, mereka

¹⁵ M. Nur el-Ibrahimi, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 222. Lihat pula Ibrahim Husein, "Dayah sebagai Pusat Pengembangan Koperasi", *Sinar Darussalam*, Nomor 168/169, (1988), 166.

¹⁶ M. Hasbi Amiruddin, "Apresiasi Terhadap Dayah sebagai Suatu Lembaga Pendidikan dan Penyiaran Agama Islam", *Jurnal Ar-Raniry*, Nomor 68 (1990), 69.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

tuangkan dalam berbagai karya monumental seperti karya yang dihasilkan Abdurrauf as-Singkili.¹⁷

Selain Dayah Cot Kala, dayah lain yang dikenal luas karena para alumninya dan dicatat sebagai pelopor dayah di Aceh adalah Dayah Makhadul Ulum Diniyyah Islamiyah di Samalanga, Bireun yang lebih dikenal sebagai Dayah Mudi Mesra Masjid Raya Samalanga yang didirikan pada abad XII Masehi dan Dayah Darussalam, dengan pendiri Teungku H. Muda Waly Al-Khalidy di Labuhan Haji, Aceh Selatan (berdiri tahun 1917 M).

Hanya dikenal satu jenis dayah di masa lalu. Namun kini, umumnya orang mengenal dua jenis dayah yakni dayah *Salafiyah* (tradisional). dan dayah *Khalafiyah* (modern/terpadu). Dayah *Salafiyah* yaitu lembaga pendidikan dayah yang memfokuskan diri pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan dayah terpadu/modern adalah lembaga pendidikan dayah yang kurikulumnya dipadukan antara departemen agama dan departemen pendidikan nasional.¹⁸

Secara organisasi dayah-dayah dikelola oleh masyarakat yang sudah dilegalkan dalam bentuk yayasan. Maka Pemerintah Aceh melakukan intervensi baik material seperti sarana prasarana maupun *support* meningkatkan kualitas dayah yang dilakukan oleh sub-dinas dayah dalam struktur Dinas Pendidikan provinsi.

Pada tahun 2003 di bawah kekuasaan Ir. Abdullah Puteh. Pemda NAD melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 451.2/474/2003 Tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah dalam Provinsi NAD, salah satu isinya adalah membuat kebijakan bahwa dayah di Aceh dibagi dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang dilakukan pemda NAD adalah dalam bentuk Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan Dayah Non Tipe.¹⁹

Kebijakan tersebut ditetapkan agar bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada dayah-dayah tersebut sesuai dengan klasifikasi dayah tersebut. Dayah tipe A

¹⁷M. Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* (Jakarta: Predana Media Group, 2007), 6.

¹⁸ Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 03/INSTR/2008 *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dayah/Pesantren Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

¹⁹ Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 451.2/474/2003 tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

memperoleh anggaran Rp. 27.000.000,- tipe B memperoleh Rp. 22.000.000,- sedangkan tipe C memperoleh Rp. 16.000.000,-

Saat ini, akreditasi dayah semakin diperluas yang dulunya hanya pada tipe A, B, C dan dayah non tipe sekarang menjadi dayah tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E dan dayah non tipe/balai pengajian. Pembagian akreditasi semacam ini berdasarkan atas substansi penilaian di antaranya jumlah santri menetap, jumlah santri tidak menetap, jumlah tenaga pengajar, kurikulum, luas tanah, dan luas bangunan. Dari hasil penilaian dengan menggunakan rumus kelas interval yang dilakukan Pusat Pengembangan GIS dan *Remote Sensing*, Universitas Syiah Kuala tahun 2008, maka didapatkan bahwa dayah yang memiliki grade penilaian 360-400 termasuk dayah tipe A, nilai 280-<360 termasuk dayah tipe B, nilai 200-<280 termasuk dayah tipe C, nilai 50-<200 termasuk dayah tipe D dan nilai 0-<50 termasuk dayah non tipe/balai pengajian.²⁰

Usaha peningkatan mutu dayah terus dijalankan pemda NAD. Sesuai dengan Qanun No 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah, maka telah dibentuk suatu badan tersendiri tentang dayah yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah. Diharapkan dengan lahirnya badan tersebut, maka mutu dayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat ditingkatkan.

Walaupun Badan Pembinaan Pendidikan Dayah telah lahir, namun masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan mengingat badan tersebut baru terbentuk. Menurut mantan Ketua Rabithah Taliban Aceh (RTA) NAD Teungku Anwar Kuta Krueng, dayah merupakan lembaga sosial keagamaan yang memiliki pengaruh besar terutama di provinsi Aceh. Ia merupakan sebetulnya ruangan laboratorium sebagai tempat mengkaji setiap pemikiran dan hadir untuk mengembangkan dakwah islamiyah serta mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai keagamaan. Namun menurut beliau lembaga pendidikan dayah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, maka pemerintah lebih memperhatikan pengembangan

²⁰ Pusat Pengembangan GIS dan Remote Sensing, *Survey Dayah tahun 2008* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008).

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

pendidikan dayah sehingga dapat menghasilkan transformasi pendidikan yang lebih cerah.²¹

Pemerintah Aceh dalam programnya akan menyalurkan bantuan anggaran untuk peningkatan mutu dayah sebesar Rp. 200 miliar untuk perbaikan 600 dayah dan pesantren di Aceh. Bantuan tersebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dayah agar setara dengan sekolah formal lainnya. Total Rp.140 miliar untuk biaya rehabilitasi, sedangkan Rp. 60 miliar lainnya untuk peningkatan mutu, kurikulum, fasilitas serta kesejahteraan para guru dan pimpinan dayah. Menurut Muhammad Nazar mantan Wakil Gubernur Aceh (2006-2011), anggaran daerah disalurkan berdasarkan tipe dayah dari hasil verifikasi tim. Dayah atau pesantren yang tidak diverifikasi, tetapi terdaftar pada Badan Dayah juga bakal diberikan bantuan. Jumlah bantuannya mungkin lebih sedikit dari dayah yang menurut verifikasi mendapatkan Tipe A hingga E. Pemerintah pusat juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan status dayah setara dengan lembaga formal. Namun kurikulumnya ditingkatkan dengan memasukkan mata pelajaran umum serta pendidikan skill. Sehingga diharapkan alumni dayah menjadi ulama yang tidak gagap teknologi.²²

Dengan lahirnya Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, maka konsentrasi pemerintah terhadap eksistensi dayah dapat terus ditingkatkan. Pada bagian kedelapan tentang pendidikan dayah pada pasal 32 disebutkan:

1. Pendidikan dayah terdiri atas dayah salafiah dan dayah terpadu/modern.
2. Dayah salafiah dan dayah terpadu dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
3. Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai *dayah manyang*.
4. Pendidikan dayah dibina oleh badan pembinaan pendidikan dayah.
5. Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
6. Dalam pembinaan pendidikan dayah, badan pembinaan pendidikan Dayah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh dan instansi terkait lainnya.
7. Lembaga pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.

²¹ Sak, "Pendidikan Dayah Masih Tertinggal", *artikel*, Banda Aceh, *Tabloid Kuta Raja*, 25 Agustus 2008. Pernyataan ini disampaikan saat beliau memberikan sambutan pada pelantikan pengurus baru RTA Aceh Besar Periode 2008-2011 di kantor Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).

²² Mrd, "Pemerintah Aceh Akan Salurkan Rp 200 Miliar Untuk Dayah", *Artikel koran Harian Aceh, Banda Aceh*, 6 Agustus 2008. Disampaikan dalam Sambutan pada Acara Wisudawan Santri Dayah Terpadu Insafuddin Banda Aceh.

8. Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dayah sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal ini diatur dalam peraturan gubernur.²³

Berbicara tentang peningkatan mutu dayah maka tidak terlepas dari beberapa aspek kajian yaitu sarana prasarana, SDM, kurikulum dan metode. Peningkatan mutu dayah yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa dayah. Namun demikian, penelitian tentang kualitas pendidikan dayah di Aceh masih jarang sekali dilakukan. Temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh *stakeholder* utama baik Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh ataupun Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren) Kementerian Agama di Aceh masih belum sinkron. Dalam LPPA 2010, data tentang pendidikan dayah juga masih sedikit. Beberapa indikator tentang kualitas dayah adalah tingkat kelulusan dan penyeteraan ijazah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut kualitas pendidikan dayah di Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Wawancara mendalam dengan individu kunci, dalam hal ini Badan Dayah, Kabid Pekapontren Kementerian Agama Kantor Wilayah Aceh, sejumlah pimpinan dayah, perwakilan santri, peneliti-peneliti dayah, perwakilan Rabithah Thaliban Aceh (RTA, Perhimpunan Santri Dayah), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan sejumlah pimpinan dayah. Wawancara dilakukan dengan tatap muka ataupun via telepon;
- b) Studi kepustakaan dengan melihat data-data sekunder, termasuk penelitian atau data sebelumnya terkait dayah;
- c) Studi kasus sejumlah dayah di Aceh. Pengambilan data dilakukan di lapangan dengan mengunjungi serta mewawancarai *stakeholder* (tenaga pengajar atau pihak manajemen) dari tiga dayah tradisional dan tiga dayah modern yang tersebar di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bireuen;
- d) Observasi selama kunjungan ke sejumlah dayah di atas.

B. Pembahasan

1. Manajemen Pendidikan Dayah

Ada beberapa aspek kompetensi pendidikan dayah yaitu aspek kompetensi dasar, kompetensi menengah atau lanjutan, dan kompetensi kepakaran. Kompetensi dasar adalah standar keilmuan dan keterampilan keagamaan yang wajib dimiliki oleh santri yang belajar di dayah dan memenuhi kebutuhannya untuk melaksanakan praktik agama dalam kehidupan sehari-hari.

²³ Qanun no 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 23.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

Kompetensi menengah adalah standar pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut yang mencakup wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu-ilmu agama yang lebih beragam dan fungsinya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Santri yang menyelesaikan pendidikan menengahnya diharapkan tidak hanya mampu mempraktikkan agama dalam kehidupan pribadi dan keluarganya tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kompetensi kepakaran adalah suatu standar dimana santri menguasai secara utuh dan mendalam suatu bidang ilmu agama, seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Falak, Hadis, Ulumul Quran, Tafsir, Lughah, Tarikh, Tasawuf dan sebagainya. Dengan kompetensi kepakaran ini, diharapkan dapat tercapainya kedalaman pengetahuan dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum dan santri secara khusus di masing-masing bidang tertentu yaitu ketika setiap hal dijelaskan oleh setiap pakar di bidangnya. Kompetensi ini juga diharapkan sebagai landasan bagi pencetakan kader-kader ulama yang pada akhirnya bisa memimpin masyarakat dan memutuskan persoalan antara mereka dengan fatwa dan ijtihad yang shahih.²⁴

Peningkatan mutu pendidikan dayah mencakup:

1. Biaya pendidikan.

Dalam Qanun Pendidikan pasal 17 ayat (2) poin a disebutkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan pendidikan dayah sesuai kewenangannya, pada poin b disebutkan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Pada pasal 46 ayat 3 disebutkan pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan dayah yang berasal dari semua sumber penerimaan ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja dayah (RAPB Dayah) atas hasil musyawarah pimpinan dan teungku dayah dengan disetujui oleh instansi pembina di kabupaten/kota.

2. Kurikulum pendidikan

Dalam Qanun Pendidikan bab VIII tentang kurikulum pasal 35 ayat (6) dan (7) disebutkan bahwa kurikulum dayah salafiyah ditetapkan oleh pimpinan dayah yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah pimpinan dayah (7), dayah

²⁴ MPD Provinsi NAD, *MPD Lima Belas tahun (1990-2005)*, Majelis Pendidikan Daerah Prov NAD (Banda Aceh, 2005), 89.

terpadu/modern yang menyelenggarakan program sekolah/madrasah mengikuti kurikulum sekolah madrasah (8).²⁵

Adapun kurikulum sekolah/madrasah adalah Aqidah, Fiqh, al-Quran dan Hadis, Akhlak dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Keterampilan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Bahasa dan Sastra Indonesia, Seni dan Budaya Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Pendidikan Jasmani dan Olahraga serta dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan daerah.²⁶

3. Pengendalian mutu pendidikan

Dayah memerlukan perhatian yang intens dalam bidang manajemen, pendanaan dan kurikulum. Selain itu dalam peningkatan mutu dayah maka aspek-aspek peningkatan mutu harus diperhatikan yaitu: Sumber Daya Manusia mencakup pimpinan dayah, tenaga pengajar. Pimpinan dayah di Aceh disebut *abu*, *abah*, *abi* dan *walid*. Semua kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti ayah. Orang tua sebagai penanggung jawab paling utama dalam sebuah keluarga, bertanggung jawab terhadap guru/istri dan anak/murid. Peran *abu* (pimpinan) dalam dayah memiliki kesamaan dengan peran ayah dalam keluarga.

Abu sangat berperan dalam pendirian, pertumbuhan perkembangan dan pengurusan sebuah dayah sehingga ia menjadi unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin dayah, keberhasilan dayah banyak tergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa serta keterampilan *abu*. Ia menjadi tokoh sentral dalam dayah.

Umumnya pimpinan dayah bukan orang yang berpenghasilan tetap. Mereka selain menjadi pimpinan dayah juga bekerja sebagai petani dan pedagang. Faktor ini berpengaruh terhadap pendanaan dan corak pendidikan yang dikembangkan di dayah sehingga mayoritas dayah di Aceh Utara tidak memiliki sumber dana yang tetap dan memadai bagi pendanaan dayah, gaji guru dan biaya operasional lainnya.

Latar belakang mereka umumnya berasal dari pendidikan dayah. Hal ini selain memperkuat jaringan dayah, juga berpengaruh terhadap manajemen dayah, wawasan pemikiran, jangkauan kurikulum serta metode pengajaran masih terpaku pada tradisi dayah masa lalu padahal waktu dan tempat membutuhkan perubahan.

²⁵ Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, 25.

²⁶ Qanun Aceh *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan* hal 24 pasal 35 ayat (3) dan (4).

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

Kemampuan pimpinan dayah dalam menguasai ilmu-ilmu agama juga masih terbatas sehingga untuk peningkatan mutu diperlukan peningkatan kemampuan pimpinan dayah di masa depan supaya sesuai dengan tempatnya.

Murid/santri merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan sebuah dayah karena langkah pertama dalam tahapan pembangunan dayah adalah harus ada murid yang belajar dan menetap di rumah seorang alim baru memungkinkan untuk membangun fasilitas yang lain. Murid biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu murid lepas dan murid mukim/*meudagang*. Santri lepas merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam dayah tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di dayah. Murid lepas biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar dayah. Sedangkan murid *meudagang* yaitu murid yang menetap dalam dayah dan biasanya mereka adalah berasal dari daerah yang jauh.²⁷

Sementara untuk meningkatkan mutu guru, dayah/teungku selama ini masih kurang usaha untuk meningkatkan mutu mengajar mereka di dayah. Hanya sedikit dari dayah yang melakukan peningkatan mutu guru dengan usaha mengirim guru untuk mengikuti penataran yang melibatkan guru dayah se Aceh. Usaha lain yang dilakukan adalah penyediaan kitab/buku bagi guru.

Untuk meningkatkan mutu pengajaran dan kualitas guru dayah perlu diadakan pembinaan teungku di antaranya:

- *Upgrading* (penataran) melalui kursus atau pelatihan.
- Pengkaderan (untuk guru madrasah atau pengganti abu)
- Pencangkokan dengan mengambil orang luar dayah yang memiliki kompetensi keilmuan yang cukup sebagai pengganti abu.
- Perangkat pendidikan seperti asrama, masjid dan fasilitas lainnya sebagai penunjang pendidikan, kurikulum

2. Sumber Pembiayaan Pendidikan Dayah

Demi kelancaran proses pendidikan, pihak penyelenggara pendidikan menerima biaya dari berbagai sumber. Adapun sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, masyarakat dan keluarga, sebagai mana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang

²⁷ Dinas Syariat Islam et.al, *Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara*, 2006, 18-19.

menyatakan bahwa. “Karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan tanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua”.

Begitu juga dengan sumber pembiayaan pendidikan dayah. Dalam menjalankan Proses Belajar Mengajar (PBM) di dayah, sangat dibutuhkan ketersediaan biaya yang cukup demi kesuksesan proses belajar mengajar sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo²⁸ yaitu: ”Sumber pendapatan pesantren (dayah): 1) kontribusi santri, 2) sumbangan dari individu atau organisasi, 3) sumbangan dari pemerintah bila ada, 4) dari hasil usaha, misalnya koperasi (*syirkah*) pesantren, kerjasama dengan pihak luar, hasil penanaman modal, dan sumber-sumberlain yang sah dan halal”.

Pendapat yang hampir senada juga diungkapkan oleh Syafruddin yang berpendapat bahwa secara umum sumber pembiayaan lembaga pendidikan Islam (termasuk dayah) dapat berasal dari: *pertama*, orang tua murid dan masyarakat, perorangan dan dunia usaha, *kedua*, pemerintah.²⁹

Dengan demikian, pembiayaan pendidikan dayah berasal dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Kontribusi Keluarga Santri

Kontribusi santri merupakan biaya yang diberikan oleh orang tua santri (keluarga) yang belajar di dayah, biasanya biaya ini diberikan per bulan, sesuai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan menurut dayah masing-masing. Jadi kontribusi santri ini sama halnya dengan iuran SPP yang harus dibayar oleh siswa di sekolah.

Tanggungjawab pendidikan bukan hanya tertumpu pada pemerintah, hal ini sesuai dengan tri pusat pendidikan yaitu: sekolah, keluarga dan pendidikan. Oleh karena itu biaya pendidikan yang bersumber dari keluarga ikut menentukan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan studi yang telah diungkapkan di atas, maka dapat dipahami bahwa santri dan keluarga sebagai salah satu sumber biaya pendidikan yang sangat

²⁸ M Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 188.

²⁹Syafruddin, *Lembaga Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 268.

menentukan keberhasilan. Untuk itu kontribusi santri melalui keluarganya tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Dayah.

2. Sumbangan Masyarakat

Masyarakat merupakan donatur tetap bagi pembiayaan dayah, mengenai sumbangan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Banyaknya masyarakat yang ingin membantu dayah didasari oleh keinginan mereka untuk berperan dan bersedekah demi kemajuan lembaga pendidikan dayah serta mengharapakan pahala dari Allah Swt.

Kelompok masyarakat merupakan salah satu komponen yang peting dalam sumber biaya pendidikan. Peran masyarakat sangat ditentukan keberhasilan proses pendidikan, baik dalam memberi masukan-masukan berupa pemikiran yang membangun maupun membantu pembiayaan demi kelancaran proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa³⁰ yaitu: “Sejalan dengan semangat manajemen berbasis sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber biaya dari pihak masyarakat baik secara perorangan maupun secara melembaga baik di dalam maupun luar negeri”.

Menurut D. Supriadi tentang biaya yang bersumber dari masyarakat, ia mengatakan: “Biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan”.³¹

Dari pendapat di atas, sangat jelas bahwa pihak penyelenggara pendidikan sangat mengharap masyarakat menjadi sumber biaya pendidikan. Baik dalam bentuk perseorangan maupun dalam bentuk kelompok masyarakat untuk kesuksesan dan kelancaran proses kegiatan belajar. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dalam mengumpulkan biaya dari masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Made Pidarta yaitu:

“Usaha-usaha yang dapat digali oleh sekolah dalam menghimpun biaya pendidikan misalnya: (a) menjual hasil karya nyata anak-anak; (b) mengadakan seni pentas keliling atau dipentaskan di masyarakat; (c) membuat bazaar; (d) mendirikan

³⁰Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung : 2004, Rosda Karya), 177.

³¹D. Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), 3.

kafetaria; (e) mendirikan toko keperluan personalia pendidikan; (f) mencari donatur; (g) mengumpulkan sumbangan; (h) mengaktifkan komite sekolah khusus dalam meningkatkan biaya pendidikan”.³²

Selain itu, biaya sumbangan pendidikan yang didapatkan dari para donatur atau masyarakat harus dipergunakan sebaik-baiknya serta transparan untuk penyelenggaraan pendidikan serta dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada pengelola biaya pendidikan di dayah. Hal ini ditegaskan oleh Lazaruth³³ yang mengatakan bahwa: “Orang tua dan masyarakat adalah sumber biaya yang sangat penting. Oleh karena itu hendaknya sekolah terbuka bagi kontrol masyarakat, agar masyarakat menaruh kepercayaan bahwa uang mereka benar-benar digunakan secara baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan”.

Oleh karena itu, pihak dayah diharapkan dapat menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat dalam usaha menggali sumber biaya demi tercapainya proses belajar mengajar yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

3. Hasil Usaha Dayah

Sumber pembiayaan yang ketiga adalah dari hasil usaha dayah sendiri. Pihak pengelola dayah tidak mungkin hanya mengandalkan biaya yang bersumber dari kontribusi keluarga santri, masyarakat dan pemerintah semata. Karena ketiga sumber tersebut tidak selalu lancar dan cukup untuk operasional proses belajar mengajar dan biaya yang dibutuhkan untuk bidang lainnya. Banyak sekali dayah yang telah membuka usaha untuk mendapatkan sumber biaya seperti membuka koperasi pesantren, membuka perkebunan dayah, usaha perdagangan, bagian perikanan, jahit menjahit dan usaha-usaha lainnya yang sanggup dilakukan serta menghasilkan pemasukan biaya bagi dayah. Namun upaya pengumpulan dana (*fundraising*) seperti ini masih belum massif di dayah-dayah yang ada.

4. Pemerintah

Pemerintah juga mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan pendidikan dayah. Biaya yang bersumber dari pemerintah dapat berupa biaya rutin

³²Made Pidarta, *Landasan Pendidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta : 1997, Rineka Cipta), 248.

³³S. Lazaruth, *Administrasi Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) 27.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru) serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.³⁴

Selain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), biaya yang diberikan oleh pemerintah juga didapatkan dari biaya subsidi, seperti biaya subsidi yang berasal dari dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan dalam bentuk bantuan khusus, seperti Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).

Pendidikan dayah yang merupakan salah satu bentuk dari pendidikan non formal sudah barang tentu akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dayah dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Bayah (RAPB Dayah)

3. Komponen Pendidikan Dayah

Secara normatif ada beberapa unsur komponen pendidikan di Dayah di Aceh, yaitu sebagai berikut:

a. Teungku

Peran penting Teungku dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah dayah (pesantren) berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Dalam skala kecil teungku yang mendirikan Dayah disebut sebagai ulama dayah, sedangkan teungku ditujukan kepada para guru-guru yang mengajar di dayah. Teungku (dalam kapasitas sebagai ulama dayah) sebagai pemimpin dayah, watak dan keberhasilan dayah banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu teungku dayah itu sendiri, karismatik dan wibawa, serta keterampilannya. Dalam konteks ini, pribadi pimpinan dayah (pesantren) sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam dayah.

Lain hal di Jawa, ulama Dayah atau Teungku Dayah, disebut Kyai. Istilah Kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Dalam bahasa

³⁴ Mulyasa, *Manajemen Berbasis ...*, 48.

Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: (1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta; (2) Gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya; (3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.³⁵

b. Masjid

Hubungan pendidikan dengan Masjid sangatlah dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu kaum muslimin selalu memanfaatkan Masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani, sosial dan politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam perspektif pesantren, masjid dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, dan shalat Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Biasanya yang pertama-tama didirikan oleh seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren adalah masjid. Masjid itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai.

Dalam konteks Aceh, masjid yang berada di tengah-tengah kompleks dayah adalah milik masyarakat yang dibangun secara bergotong royong. Dalam hal ini, masyarakat selalu menjalin komunikasi dengan secara aktif dengan ulama dayah di masjid setiap seminggu sekali pada hari Jumat.

c. Murid/Santri

Murid atau santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah bahwa harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya.

Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren jadi

³⁵ Zamakshary Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3I, 1986), 55.

tidak keberatan kalau sering pergi pulang. Makna santri mukim ialah putera atau puteri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren.³⁶

d. Metode Pengajaran

Ada beberapa metode pengajaran yang telah dipraktekkan di dayah, namun pihak dayah tidak menyadari bahwa telah menggunakan metode-metode tersebut, karena penggunaan metode pengajaran di dayah tidak dicantumkan dalam program tahunan yang berbentuk seperti satuan pelajaran yang digunakan di sekolah. Sekarang ada dayah yang telah dapat mengorganisasikan metode pengajarannya dengan baik. Adapun metode-metode pengajaran dayah tradisional di Aceh meliputi: *metode sorogan, metode wetonan/bandongan, metode musyawarah/bahsul masail, muhazarah, metode pasaran, metode hafalan (Tahfizh), diskusi kelompok terfokus, dan debat.*

4. Kendala Pendidikan Dayah

Pada dasarnya apa yang disebut kendala dalam konteks dayah tidaklah semuanya menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Ada sebagian permasalahan yang dianggap kendala oleh para pemerhati pendidikan maupun pemerintah, tetapi bagi para pengelola dayah sendiri maupun para santri-santrinya bukanlah dianggap kendala. Hal ini mengingat berbedanya paradigma dan orientasi pendidikan yang ada di dayah dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Di antara hal yang paling nyata adalah bahwa dayah mempunyai orientasi pendidikan untuk semata-mata mencari ilmu dan dapat mengembangkan ilmu tersebut ke berbagai pelosok, baik dengan cara berdakwah, pengajian bahkan dengan mendirikan dayah-dayah lainnya di tempat mereka hidup. Sementara itu orientasi pendidikan pada lembaga lain secara tegas dan jelas ditetapkan sebagai tempat pelatihan dan persiapan bagi peserta didik untuk masa depan yang lebih

³⁶*Ibid.*, 52.

baik. Berikut ini beberapa kendala yang dianggap cukup berpengaruh dalam perkembangan dayah:

a. Penyusunan Kurikulum

Penyusunan kurikulum pada umumnya dilakukan oleh badan, lembaga, tim, atau departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Hal demikian tidak terdapat lembaga dayah, sebab pimpinan dayah merupakan kunci utama dalam menentukan semua kebijakan dayah tersebut, termasuk dalam bidang kurikulum. Artinya semua kebijakan yang ada di dalam dayah harus mendapat restu dari pimpinan sentralnya. Hal ini tidak mengherankan sebab pada dasarnya memang dayah itu sendiri adalah pancaran kepribadian dari sang pimpinan (Abu) dan biasanya merupakan pendirinya.³⁷ Dengan demikian jika kita ingin melihat tentang landasan atau dasar dalam penyusunan kurikulum pondok pesantren, kita harus melihat pribadi Abu itu sendiri terlebih dahulu. Artinya kita harus mengetahui pandangan hidup Abu tentang faktor-faktor yang melandasi penyusunan kurikulum dayah itu.

Karena itu, kurikulum antara dayah yang satu dengan dayah lainnya tidak persis sama, walaupun pimpinannya berasal dari satu lembaga yang sama. Di samping itu karena semua hal tergantung dan berkaitan erat dengan pimpinan sentralnya, maka sulit kiranya bagi sebuah dayah untuk mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. Di samping itu para pimpinan dayah juga sangat jarang memperoleh pendidikan dalam bidang kurikulum, sehingga ia kurang mampu menyusun kurikulum dalam periode-periode tertentu serta tidak dapat mengejar target-target pengajaran tertentu.

b. Tata kelola/Manajemen

Umumnya para pimpinan dayah kurang memiliki pengetahuan dalam segi manajemen keorganisasian. Kepemimpinan yang mereka laksanakan lebih cenderung berdasarkan pengalaman serta hasil renungan mereka sendiri, bukan dari berbagai teori manajemen ataupun pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini, persoalan manajemen dapat dianggap sebuah kendala yang cukup berpengaruh bagi keberadaan dan keberlangsungan suatu dayah. Realitas yang dapat ditelusuri dari berbagai kasus pada dayah-dayah di Aceh, yang disebabkan kurangnya kemampuan pimpinannya dalam mengelola dayah, terjadi berbagai ketimpangan seperti tidak teraturnya jam belajar,

³⁷ Nurkholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 6.

kurangnya tenaga pengajar serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para santri yang tidak terkendali oleh pimpinannya.

c. Ekonomi/Pendanaan

Pada umumnya dayah merupakan usaha pribadi seorang ulama, bukan usaha sesuatu yayasan. Dayah-dayah ini didirikan atas dasar dorongan tanggung jawab pribadi masing-masing ulama untuk mengembangkan pendidikan agama Islam selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas. Umumnya para pendiri dayah itu sendiri merupakan alumni dari suatu dayah pula. Ia dianggap oleh masyarakat sekitarnya mempunyai kemampuan untuk mengajarkan anak-anak mereka, sehingga masyarakat mendukungnya. Kebanyakan pimpinan dayah mempunyai mata pencaharian layaknya masyarakat perkampungan seperti bertani, berkebun serta hasil uluran tangan masyarakat yang menyerahkan anak-anak mereka kepadanya. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebanyakan dayah tidak mendapat suntikan dana yang rutin dari lembaga lain baik pemerintah maupun swadaya masyarakat. Tetapi hanya mengandalkan penghasilan pribadi pimpinan dayah serta pemberian (sumbangan) sukarela. Untuk itu sulit kiranya untuk mengembangkan dayah-dayah tersebut selama masih menganut sistem ekonomi seperti itu.

d. Regenerasi

Kebanyakan dayah bertahan sampai wafatnya pimpinan dayah tersebut. Hal ini dikarenakan para pimpinan tidak mempersiapkan generasi yang akan memimpin lembaga dimaksud. Di samping itu, karena dayah merupakan lembaga pribadi, bukan yayasan ataupun lembaga yang melibatkan orang banyak, maka sulit kiranya mempertahankan eksistensi dayah apabila pimpinannya telah meninggal dunia. Walaupun demikian terdapat juga dayah-dayah yang sanggup mengatasi hal ini dengan cara mempersiapkan generasi dari kalangan sendiri seperti anak kandung pimpinan atau menantu pimpinan untuk melanjutkan lembaga dayah tersebut.

e. Teknologi dan Informasi (Iptek)

Dayah tradisional dengan berbagai tradisi yang dipertahankan sejak turun temurun, menghadapi problematika dalam menjaga perkembangan dan eksistensinya. Salah satu problema yang sulit dapat dirubah adalah kebanyakan dayah tradisional memandang teknologi dan informasi modern sebagai sesuatu yang tabu dan bahkan dianggap sebagai “barang haram” untuk dibawa masuk ke dalam lingkungan dayah. Karena paradigma seperti itu, maka dalam hal penyesuaian diri dayah tradisional dengan kemajuan teknologi dan informasi mengalami ketertinggalan. Keadaan

seperti ini sangat sulit untuk diselesaikan selama para pimpinan dayah tradisional belum beralih kepada manajemen dan informatika modern.

Secara umum, apabila berbicara tentang manajemen dayah, maka seharusnya yang menjadi titik perhatian terbesar adalah dayah tradisional, dengan berbagai alasan di atas. Adapun untuk dayah terpadu atau modern, pada umumnya sudah memiliki manajemen yang memadai. Sebagai contoh adalah Dayah Jeumala Amal Lueng Putu, manajemen kelembagaan dayah tersebut sudah mendapatkan akreditasi internasional. Dayah Jeumala Amal pada tanggal 1 November 2011 memperoleh penghargaan ISO 9001 dan 2008 di bidang Manajemen Mutu Pendidikan dari pihak *Worldwide Quality Assurance (WQA)*.³⁸

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2012 menerima penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Pesantren Pertama di Tanah Air yang menerima penghargaan internasional tersebut. Menurut Juri MURI, Nurdin, yang mewakili Ketua MURI, Jaya Suprana, “Pemberian ini dikarenakan atas dasar pengelolaan manajemen dayah serta kualitas alumni yang bermutu tinggi serta memperoleh penghargaan dari ISO 9001 dan 2008 sehingga menggerakkan kami untuk memberikan rekor MURI kategori Pondok Pesantren pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001 dan 2008”.³⁹ Perlunya fokus yang lebih besar untuk dayah tradisional juga dikemukakan oleh staf BPPD Aceh.⁴⁰

“Kalau (dayah) modern selesai urusan, bahkan dalam beberapa rapat intern ada saya katakan, Badan Dayah harus berpikir dayah salafiah. Mohon maaf saya katakan, kalo dayah modern dari sisi apa pun, manajemen mereka bagus, karena yang pimpin biasa doktor-doktor. Yang pimpin alumni-alumni Timur Tengah, pendanaan tidak ada masalah, karena yang menyekolahkan anak di situ adalah anak-anak berduit, malah iurannya sampai tujuh ratus ribu per bulan dan segala macam. Fasilitas tidak ada masalah, kurikulum tidak ada masalah. Dimana-mana PORSENI itu menjadi tolak ukur, juara segala macam pasti Darul Ulum (Banda Aceh), (Dayah Jeumala Amal) Lueng Putu misal seperti itu kira-kira, *kan* ini ceritanya. Kalo ini sudah oke, bicara pendidikan kita larang pun orang akan bawa anaknya ke situ (dayah modern). Maka daya tampung lima ratus (anak) yang mendaftar bisa dua ribu (orang). Inikan indikasi bahwa sukanya produk (dayah modern).Tapi di dayah salafiah jika kita batasi, jika kita tidak terjun untuk berfikir, justru akan terjadi kejadian kenapa pemerintah membuat aturan tentang bibit unggul dinas pertanian, *kan* ada. Jangan dijual sembarangan bibit unggul durian setelah kita beli kita tanam dikatakan 10 tahun akan berbuah, begitu 10 tahun sudah tidak ada hasil. Begitu

³⁸ Wawancara dengan Tgk. Hamdani, Penasehat dan mantan Wakil Direktur Dayah Jeumala Amal, Lueng Putu, 13 Februari 2013.

³⁹ *Serambi Indonesia*, 29/05/2012.

⁴⁰ Wawancara dengan Salman, Kasi Sarana dan Prasarana BPPD Aceh, Banda Aceh, 5 Maret 2013

banyak biaya dan waktu yang telah kita korbankan. Begitu juga jika orang membuat dayah pengajian di *gampong*. Kalau memang pemerintah tidak ada campur tangan, selesai tiga tahun belajar di dayah (tradisional), tetapi tidak bisa apa-apa”.

5. Kurikulum Pendidikan Dayah

a. Kurikulum Dayah Tradisional

Kurikulum pendidikan dayah dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2000 Pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di dayah diatur oleh pimpinan dayah yang bersangkutan. Hal yang sama juga dikuatkan oleh Qanun No. 23 Tahun 2002. Pasal 23 yang menyebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada dayah diatur oleh pimpinan dayah dan atau oleh musyawarah pimpinan dayah.

Nurkholish Madjid menyebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan pondok pesantren adalah:⁴¹

1. Cabang ilmu fiqh, terdiri dari: *Safīnah al-Najāh*, *Fatḥ al-Qarīb*, *Taqrīb*, *Fatḥ al-Mu’īn*, *Minjah al-Qawīm*, *al-Iqnā’*, dan *Fatḥ al-Wahhāb*.
2. Cabang ilmu tauhid, terdiri dari: *‘Aqīdah al-‘Awam*, *Badi al-‘Amal*, dan *al-Sanusiah*.
3. Cabang ilmu tasawuf terdiri dari: *al-Naṣā’ih al-Dīniyah*, *Irsyād al-Ibād*, *Tanbīh al-Ghāfilīn*, *Minjah al-‘Ābidīn*, *al-Da’wah al-Tāmmah*, *al-Ḥikmah*, dan *Bidāyah al-Bidāyah*.
4. Cabang ilmu nahwu sharaf terdiri dari: *al-Jurūmiyah*, *al-Maqsūd*, *al-‘Awāmil*, *al-Imrithy*, *Kailany*, *Mirḥat al-I’rāb*, *Alfiah Ibn Mālik*, dan *Ibn ‘Aqil*.

Secara umum orientasi pendidikan Islam meliputi: orientasi pada pelestarian nilai, orientasi pada kebutuhan sosial, orientasi pada tenaga kerja, orientasi pada peserta didik, orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, materi kurikulum pendidikan dayah diajarkan secara turun temurun dari teungku kepada para muridnya. Selanjutnya ketika sang murid telah selesai menempuh pendidikan, ia akan pulang ke kampungnya dan membuka dayah dengan metode yang persis sama seperti yang dipelajari dari teunggunya. Hal ini

⁴¹Nurkholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren...*, 17.

berlangsung terus menerus dan disebut *genealogy of learning* yang umumnya berasal dari Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan atau MUDI Mesra Samalanga.⁴²

b) Kurikulum Pendidikan Dayah Modern

Kurikulum Dayah Modern di Aceh dibagi dalam kategori 4 (empat) aspek:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| A. Ilmu Umum | 2. Insya' |
| 1. Sejarah Indonesia | 3. Muthala'ah |
| 2. Fisika | 4. Mahfudhat |
| 3. Kimia | 5. Nahwu |
| 4. Biologi | 6. Sharaf |
| 5. Bahasa Indonesia | 7. Balaghah |
| 6. Ekonomi | 8. Tamrin Lughah |
| 7. Akuntansi | 9. Tarikh Adab |
| 8. Sejarah | 10. Mantiqh |
| 9. Tata Negara | D. Pelajaran Agama |
| 10. Antropologi | 1. Al Qurán |
| 11. Geografi | 2. Hadits dengan kitab |
| 12. Jurnalistik | 3. Tajwid |
| 13. Administrasi | 4. Hadits tanpa kitab |
| 14. Komputer | 5. Tafsir |
| 15. Teknologi Informasi | 6. Musthalah Hadits |
| B. Ilmu Bahasa Inggris | 7. Tauhid |
| 1. Conversation | 8. Fiqih |
| 2. Reading | 9. Usul Fiqih |
| 3. Writing | 10. Faraid |
| 4. Listening | 11. Perbandingan Agama |
| C. Ilmu Bahasa Arab | 12. Tarikh islam |
| 1. Muhadatsah | 13. Terjemahan Al Quran |

Dengan membandingkan kedua kurikulum di atas, secara umum kedua jenis dayah memiliki kekhususan yang seharusnya menjadi keistimewaan dayah itu sendiri. Oleh karena itu, kurikulum dayah pada dasarnya tidak dapat diseragamkan sepenuhnya, namun harus melihat potensi dari setiap dayah yang ada. Dalam praktek di lapangan, penyeragaman kurikulum justru bisa saja tidak efektif karena kekurangan tenaga kerja. Menurut salah seorang narasumber:

“Jadi kan, sekarang dayah didengungkan penyeragaman kurikulum. Sementara apabila kita lihat perguruan tinggi sendiri. Tidaklah begitu seragam kurikulumnya. Ada kurikulum terdahulu dan mungkin itu yg perlu diseragamkan. Tapi yang lain kan ada muatan lokal. Menurut wilayah masing-masing. Saya kira dayah begitu juga. Secara umum hampir sama. Tapi untuk disamakan secara persis, janganlah, hilang kewenangan dayah

⁴² Secara garis besar, hal ini juga diutarakan oleh narasumber di Dayah MUDI Mesra, Samalanga, 12 Februari 2013

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

untuk mengembangkan potensi pribadi dayah. Contoh ilmu falaq, meskipun dipaksakan semua dayah harus ada ilmu falaq. Sementara guru ngajar tidak ada. Jadi dari dayah-dayah yang memang teungkungnya, pimpinannya atau gurunya ada yang mahfum ilmu falaq, jadi ditambahkan ilmu falaq” (Tgk. M, 13 Maret 2013).

Selain itu, indikator keberhasilan dayah tidak dapat diukur hanya dengan melihat tingkat kelulusan. Justru yang paling terlihat adalah kontribusi alumni dayah dalam masyarakat. Peran mereka dalam bidang keagamaan seperti memberikan pengajian, ceramah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini memang sulit diukur namun bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurut salah seorang narasumber:

“Kalau dikatakan kalah bersing, dalam bidang apa? Mungkin dalam bidang mencari pekerjaan...maksud saya yang arahnya ke pegawai, intinya yang beradministrasi, iya. Tapi kalau berjualan tidak hanya bisa dilakukan oleh tamatan SMA, anak dayah pun mungkin bisa lebih dalam hal berjualan. Ada yang sukses berdagang, ada pula yang sukses buka bengkel” (HA, 6 Maret 2013).

6. Tipologi Pendidikan Dayah

Tipologi dalam pendidikan pesantren secara umum di Indonesia tidak ditemukan. Provinsi Aceh satu-satunya provinsi yang mengurus penyelenggaraan pendidikan dayah. Di Provinsi Aceh, pendidikan dayah dikendalikan oleh dua lembaga, yaitu Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) dan Departemen Keagamaan (Kemenag) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tipologi pendidikan dayah di Aceh yang peneliti temukan bersumber pada dua model yaitu: model Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) dan model Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan tipologi itu pulalah dayah dipetakan dan dapat dihitung jumlahnya. Perbedaan ini seharusnya dapat diminimalisir apabila kedua institusi melakukan koordinasi secara berkala. Menurut Kepala Bidang Pekapontren Kemenag Aceh, saat ini, koordinasi tersebut sudah dilakukan namun frekuensinya sangat kecil yaitu dua kali dalam setahun.

7. Bantuan Pendidikan Dayah

Untuk mendapatkan bantuan, pemerintah telah menerapkan tipologi atau persyaratan khusus. Untuk BPPD Aceh, bantuan diberikan berdasarkan tipologi A, B, C, D, Non Tipe dan Balai Pengajian. Sedangkan Kementerian Agama memberikan bantuan berdasarkan kriteria lainnya seperti legalitas, lama berdiri,

asset, luas tanah dll yang diatur secara nasional. Meskipun berbeda, kedua lembaga mengakui bahwa bisa saja terjadi tumpang tindih pemberian bantuan karena dayah tipe A bisa jadi memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Kemenag. Namun dalam beberapa hal, BPPD dan Kemenag sudah saling berkoordinasi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tersebut.⁴³

a. Bentuk Bantuan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pembinaan Pendidikan Dayah 2008-2012 disebutkan sejumlah program yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Provinsi Aceh. Visi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) adalah terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat yang Berkualitas.⁴⁴ Sedangkan misinya adalah Meningkatkan Pendidikan Dayah Yang Berkualitas Melalui Tenaga Pendidik, Kurikulum, Sarana & Prasarana, Manajemen & Pendanaan; Meningkatkan Peran Dayah Dalam Mewariskan & Membangun Masyarakat Madani; Mengupayakan Pendidikan Ketrampilan Hidup; Pemberdayaan Kemampuan Ekonomi Dayah Untuk Meningkatkan Pendanaan Sendiri; Mengupayakan Agar dayah di Provinsi NAD Tidak Menjurus Dalam Gerakan Ekstrim Tapi Menciptakan Dayah Moderat dan Toleran.

Program BPPD dibagi atas dua jenis, yang pertama program tidak langsung, dan program yang berdampak langsung. Berikut adalah program yang tidak langsung seperti dalam kategori-kategori berikut:⁴⁵

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makan & Minum
11. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

⁴³ Hasil wawancara dengan Rusmiady, Kepala BPPD Aceh, 5 Maret 2013, wawancara dengan Abrar Zym, Kabid Pekapontren Kemenag Aceh, Banda Aceh, 4 Maret 2013

⁴⁴ Dokumen BPPD Provinsi Aceh, 2008-2012.

⁴⁵ Dokumen BPPD Provinsi Aceh, 2008-2012.

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

Kategori Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kategori Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sedangkan Program yang berdampak langsung dengan pendidikan dayah adalah sebagai berikut :

Kategori Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yang meliputi :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kategori Program Pendidikan dayah

1. Pelatihan Pembinaan Kaligrafi
2. Pembinaan Santri
3. Pembinaan Manajemen Dayah
4. Pelatihan Survey Dayah
5. Pelatihan Komputer Untuk Santri Dayah
6. Pengembangan Kurikulum Dayah
7. Pembinaan Kelembagaan Dayah & Pengembangan Dayah
8. Pengadaan Alat Praktek & Peraga Santri
9. Penyediaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
10. Penyediaan Dana Operasional Dayah
11. Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah
12. Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah di Kabupaten/Kota (Otsus)

Kategori Program Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah

1. Pembangunan & Pengembangan Sarana dan Prasana Dayah
2. Pembangunan & Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Kabupaten/Kota (Otsus)
3. Pembangunan Pesantren Bertaraf Internasional di Malikul Saleh
4. Pembangunan Pesantren Perbatasan (4 Kabupaten/Kota)
5. Bantuan Dayah/Balai Pengajian

Kategori Program Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dayah

1. Pelatihan Kompetensi Teungku Dayah
2. Pendidikan Lanjutan Bagi Teungku Dayah ke Luar Negeri
3. Penyediaan insentif Pimpinan dan Teungku Dayah
4. Bantuan Untuk Tenaga Pengajar Kursus Matematika & IPA Untuk Santri
5. Bantuan Untuk Tenaga Pengajar Bahasa Inggris & Bahasa Arab
6. Bantuan Ulama Dayah

Kategori Program Pemberdayaan Santri Dayah

Arfiansyah dan Muhammad Riza

1. Pelatihan Komputer Santri Dayah
2. Pelatihan Life Skill Santriwati (Menjahit Konveksi)
3. Pelatihan Life Skill Santriwan (Reparasi Elektronik)
4. Bantuan Untuk Kegiatan Ekstra Kurikuler Santri
5. Musabaqah Qirawatil Kutup & Sayembara Baca Kitab Kuning
6. Pelatihan Jurnalistik Santri
7. Pembinaan dan Pembinaan Kurikulum Dayah

Kategori Program Pembinaan Manajemen Dayah

1. Pelatihan Manajemen Dayah
2. Legalisasi dan Sertifikasi Kepemilikan Tanah Dayah
3. Pelatihan Aset Manajemen Dayah
4. Evaluasi & Pelaporan Pembinaan Pendidikan Dayah
5. Pelatihan Usaha Kesehatan Dayah (UKD)
6. Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Dayah

Kategori Program Pengembangan Tehnologi Informasi dan Pengembangan Perpustakaan Dayah

1. Pengadaan Kitab/Buku Dayah/ biaya Pengiriman
2. Penerbitan Berkala Majalah/Jurnal Infotainment Dayah
3. Penyediaan Alat Bantu Proses Belajar Mengajar di Dayah
4. Penyediaan Alat bantu Pendidikan Olah Raga santri

Kategori Program Penelitian dan Pengembangan Dayah

1. Penelitian dan Pengembangan Dayah
2. Forum Silaturahmi Pimpinan Dayah
3. Rakor Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
4. Penyusunan Buku Profil Dayah

Sebagai catatan, untuk jenis bantuan dari Kemenag pada dasarnya hampir sama, namun peneliti tidak mendapatkan dokumen yang menjelaskan jenis bantuan tersebut secara rinci.

b. Dampak Bantuan

Semua responden dalam penelitian ini mengaku bahwa bantuan yang diterima oleh pihak dayah sangat membantu keberlangsungan pendidikan dayah itu sendiri. Secara umum, ada tiga dampak positif bantuan yaitu:

1. Bertambahnya sarana & prasarana dayah
2. Peningkatan kapasitas insan dayah (pengelola, teungku, santri)
3. Mendorong bertambahnya lembaga pendidikan dayah (penguatan institusi dayah)

Oleh karena itu, eksistensi dayah harus tetap didukung dengan berbagai bentuk. Hal ini seperti diutarakan oleh salah seorang narasumber:

Sekarang kita lihat penyelamat dayah adalah penyelamat aqidah bangsa. Kalau tidak ada lagi dayah semua hancur. Kemudian apabila orang membangun

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

dayah, jangan ada yg larang. Itu saya katakan barusan, meskipun kewajiban, jangan krn dimana bisa ambil dana. biarlah alakadar asalkan dayah dibangun. (Tgk. FA, 13 Februari 2013)

Meskipun demikian, para responden beranggapan bahwa di sisi lainnya bantuan pemerintah memberikan dampak yang negatif antara lain:

- a. Mengubah paradigma teungku dayah dari yang dulunya berbicara soal kajian kitab atau ilmu ke pembicaraan seputar proposal bantuan (*proposal oriented*). Ini akhirnya melahirkan stigma negatif terhadap pemimpin (teungku) dayah dan memudarkan kharisma mereka.

“..Yang lebih rusak lagi, orientasi pembicaraan teungku-teungku.. Dulu..itu bagaimana hukum itu dikeluarkan, kan tidak ada di dalam kita kita... Sekarang..waktu bertemu.. tidak mau kita pergi (ke Badan Dayah)..tidak keluar uang (cair dana)”(HA, 6 Maret 2013)

- b. Terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan oleh BPPD Aceh dan Kemenag, seperti yang diutarakan di atas.
- c. Kurang efektifnya bantuan yang diberikan. Misalnya ada kitab yang tidak dipelajari namun tetap dibagikan. Contoh lain adalah pelatihan yang tidak tepat sasaran dan terkesan tidak transparan. Menurut pengalaman salah seorang narasumber:

“Kemarin saya ditelepon oleh Kemenag Bireun. (Katanya) begini teungku, ada pelatihan yang dibuat oleh Pekapontren. Pelatihan ini penting, jangan diwakili orang lain. Jadi anda memang harus diwajibkan hadir. Jadi karena memang amanahnya begitu makanya saya datang. Dalam bayangan saya, ada pemateri-pemateri bagus yg kualitas nasional. Sesampai di sana, tempo tiga hari dipersingkat. Kemudian pemateri karyawan yang bekerja di Pekapontren. Tidak ada yang dari luar. Kan cukup kecewa saya, buang-buang waktu, padahal saya ada urusan yang lebih penting. Mungkin dari sisi penguasaan manajemen, lebih kita kuasai daripada yang memberikan materi. Nah, berapa banyak sudah dihabiskan waktu duduk dan mendengar pelatihan tersebut. Lainlah apabila diselenggarakan secara betul-betul. Contoh tentang manajemen ya harus ahli manajemen lah. Inilah maksud saya, kenapa tidak diundang pemateri luar? Berarti honorinya kan bisa dikorup. Honor panitia, honor pemateri lagi.” (Tgk. M, 13 Maret 2013)

Menstimulasi terjadinya data fiktif karena keinginan untuk mendapatkan insentif dari BPPD Aceh. Hal ini mengakibatkan lahirnya dayah-dayah “siluman”

- d. Anggaran bantuan dayah khususnya melalui BPPD Aceh sangat tergantung kepada dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Karena

sudah memasuki ranah politik, maka berpotensi melahirkan sentiment politik pula. Tak sedikit dayah yang bertipe C kemudian tiba-tiba naik ke Tipe B karena kedekatan sang pimpinan dengan anggota dewan pemilik dana aspirasi. Sedangkan teungku yang masih menjaga jarak dari politik bisa saja tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya. Berikut salah satu kutipan dari salah seorang narasumber:

“Karena ada intervensi daripada orang-orang pihak tertentu, pada satu hari saya pernah pergi ke Badan Dayah ketika Bapak Bustami menjadi Kepala (red-Badan Dayah). Saya mendengar “Dayah itu harus tipe A harus tipe B”, padahal itu hanya balai pengajian.itu (red-ada kelompok tertentu) yang intervensi. Ditelpon ke tempat kami, tidak boleh diberikan (tipe dayah)” kata mereka. Yang seperti itu, jadi ya tidak murni lagi.” (Tgk B, 27Februari 2013)

- e. Mengurangi minat swadaya masyarakat dalam membantu dayah. Ini berdampak jangka panjang karena pada akhirnya akan menghilangkan sikap sosial dari masyarakat untuk membantu eksistensi proses belajar mengajar sebuah dayah. Masyarakat tidak peduli dengan dayah karena sudah menjadi wilayah birokrasi pemerintah. Selain itu, pudarnya rasa memiliki bahwa dayah itu milik masyarakat, karena pemerintah sudah mengeluarkan regulasi bahwa semua dayah itu harus memiliki landasan hukum (akte notaris). Dengan adanya intervensi Pemerintah terhadap dayah, terkesan adanya sebuah pembatas antara dayah dengan masyarakat, karena harus bersikap birokratis dan formal, hal ini mencederai sikap masyarakat yang cenderung apa adanya.

Berikut kutipan-kutipan lainnya dari berbagai narasumber terkait pemberian bantuan Pemerintah untuk dayah:

“...yang anti dayah pih peugot dayah [yang (red-dulunya) anti dayah juga (red-sekarang) membuat dayah]” (Tgk B, 27 Februari 2013)

“...puruno peugot bolu pih (nan jih) dayah cit [(red-tempat) belajar membuat kue bolu (namanya) dayah juga]” (Tgk B, 27 Februari 2013)

“...yang jeut keu teungku parte hana jak beut [yang menjadi teungku kelompok yang tidak mengaji]” (Tgk B, 27 Februari 2013)

“...jino hana le...Masyarakat keudroe, dayah keudroe [sekarang sudah tidak ada lagi, masyarakat sendiri, dayah sendiri]” (HA,19 Maret 2013)

BPPD Aceh sendiri sebagai lembaga utama yang diamanatkan untuk memberikan perhatian terhadap dayah di Aceh memiliki keterbatasan sendiri. Salah satu yang paling krusial adalah keterbatasan dana. Hal ini berimplikasi pada

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

minimnya target sasaran yang ingin dicapai, seperti diutarakan oleh Muslim Mahmud Kabid Manajemen BPPD Aceh:⁴⁶

“Untuk hari ini kita ada dengan anggaran kita yang terbatas, ya kan, kita hanya untuk 40 orang misalnya pimpinan dayah yang kita berikan (pelatihan) tata kelola manajemennya per tahun. Jadi kalo (alokasi anggarannya hanya untuk) 40 orang per tahun (butuh) berapa tahun (lagi) baru akan tuntas (semuanya)?”

Selain itu, pendapat-pendapat negatif tersebut secara sepihak juga dibantah oleh narasumber yang mewakili Rabithah Thaliban Aceh. Menurutnya, sedikit sekali teungku yang berorientasi proposal dan memiliki ketergantungan pada pemerintah.⁴⁷

C. Penutup

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum dayah tradisional membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan dayah terpadu atau modern, khususnya pada sisi manajemen kelembagaan. Hal ini dikarenakan manajemen dayah tradisional lebih berorientasi pada teungku (*teungku-centered*) dibandingkan dayah modern yang lebih profesional. Sedangkan dari aspek kurikulum kedua jenis dayah memiliki kekhususan masing-masing berdasarkan metode dan materi pembelajarannya. Meskipun secara umum kurikulum sesama dayah tradisional ada kesamaan karena genealogi pembelajaran yang berasal dari Labuhan Haji atau Samalanga. Adapun dayah modern/terpadu secara umum juga memiliki persamaan pada konsep memadukan ilmu umum dengan agama.

Dampak bantuan pemerintah, secara umum memiliki manfaat yang positif meskipun ada juga yang memandangnya berdampak negatif. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat digeneralisir dan harus dicari jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zakaria. *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Monora, t.th

Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Sistem Pendidikan di Masa Khalifah Islam*, Surabaya: Al-Izzah, 1996.

⁴⁶ Wawancara dengan Muslim Mahmud Kabid Manajemen BPDD Aceh, Banda Aceh, 5 Maret 2013.

⁴⁷ Wawancara dengan perwakilan RTA, Banda Aceh, 3 Maret 2013.

Arfiansyah dan Muhammad Riza

- Amiruddin, M. Hasbi. "The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh". *Thesis*. Kanada: Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994.
- Bilgrami, Hamid Hasan dan Sayid Ali Asyraf. *Konsep Universitas Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Daud Zamzami M., dkk. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Jakarta: Predana Media Group, 2007.
- Daudy, Ahmad. *Allah dan Manusia dalam Konsep Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Dhofier, Zamakshary. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3I, 1986.
- Dinas Syariat Islam kab. Aceh Utara dan MPU Aceh Utara serta STAIN Mallikussalleh, *Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara*, (Lhokseumawe, 2006)
- Dokumen SKPA, BPPD Provinsi Aceh, 2008-2012
- el-Ibrahimi, M. Nur. *Teungku Muhammad Daud Beureueh*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Hasjmy, A. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.
- _____. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Husein, Ibrahim. "Dayah sebagai Pusat Pengembangan Koperasi". *Sinar Darussalam*, Nomor 168/169, 1988.
- Idris, Safwan. "Tokoh-tokoh Nasional: Overseas Educational and the Evolution of the Indonesia Educated Elita". *Disertasi*. University of Wisconsin: Madison, 1982.
- _____. "Refleksi Pewarisan Nilai-nilai Budaya Aceh, Peta Pendidikan Dulu dan Sekarang", *Jurnal Ar-Raniry*, No. 73, Banda Aceh, 1998.
- Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 03/INSTR/2008 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dayah/Pesantren Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*
- Ismuha. "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", Monograph Lembaga Ekonomi dalam Kemasyarakatan. Jakarta: LIPI & Departemen Agama RI, 1976.
- Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 451.2/474/2003 tentang Penetapan Kriteria Dan Bantuan Dayah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003

- Laporan Penelitian. “Pengaruh PUSA Terhadap Reformasi di Aceh”, *Jurnal IAIN Ar-Raniry*, No. 70, 1978.
- Lazaruth S. *Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- M. Hasbi Amiruddin. “Apresiasi Terhadap Dayah sebagai Suatu Lembaga Pendidikan dan Penyiaran Agama Islam”. *Jurnal Ar-Raniry*, Nomor 68, 1990.
- Madjid, Nurkholish. *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- MPD Provinsi NAD (2005) *MPD Lima Belas tahun (1990-2005)*, Majelis Pendidikan Daerah Prov NAD
- Mrd. “Pemerintah Aceh Akan Salurkan Rp 200 Miliar Untuk Dayah”, *Artikel koran Harian Aceh*, Banda Aceh, 6 Agustus 2008.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Pidarta, Made. *Landasan Pendidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Pohan, Rusdin, dkk. “Laporan Penelitian Fluktuasi Pendidikan Agama di Aceh”. Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, 1980.
- Pusat Pengembangan GIS dan Remote Sensing, *Survey Dayah tahun 2008*, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh
- Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Sak. “Pendidikan Dayah Masih Tertinggal”, *Tabloid Kuta Raja*, 25 Agustus 2008.
- Saleh, Abd. Rahman, dkk. *Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, Departemen Agama RI: Proyek Pembinaan Bantuan kepada Pondok Pesantren 1984/1985 Ditjen Bimbaga Islam, 1985.
- Sudirman. “Lembaga Pendidikan Dayah pada Masyarakat Aceh”. *Buletin Haba*, Nomor 12, 1999.
- Sulaiman, M. Isa. *Sejarah Aceh, sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Sulthon Masyhud M., dan Moh Khusnurdilo. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Supriadi, D. *Satuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Syafruddin. *Lembaga Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Arfiansyah dan Muhammad Riza

Talsya, T.A. "Pendidikan di Aceh Sebelum Indonesia Merdeka", *Jurnal Santunan*, No. 82, 1982.

Walidin, Warul Ak. "KBK: Sebagai Suatu Alternatif Dalam Pelaksanaan Pendidikan", *Makalah Hasil Semiloka*, Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah UNMUHA, 2004.